

Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak

5 tahun berlalu 

Laporan Dasar 2020





ASEAN-Australia Counter Trafficking

Maret 2022

Penulis: Cate Sumner, Senior Adviser, ASEAN-ACT

Hak cipta dari seluruh dan setiap bagian dari dokumen ini adalah milik Cardno dan tidak dapat digunakan, dijual, dialihkan, disalin atau diproduksi ulang secara keseluruhan atau sebagian dengan cara apa pun atau dalam atau pada media apa pun kepada orang lain selain melalui persetujuan dengan Cardno. Dokumen ini di produksi oleh Cardno demi manfaat dan penggunaan oleh klien sesuai dengan ketentuan perikatan. Cardno tidak dan tidak akan mengemban tanggungjawab atau kewajiban apa pun kepada pihak ketiga mana pun yang timbul dari segala penggunaan, atau kepercayaan oleh pihak ketiga mana pun terhadap konten dari dokumen ini.

Pernyataan Penyangkalan: Pemerintah Australia telah mendanai publikasi ini melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Pandangan-pandangan yang tertulis dalam publikasi ini adalah milik penulis sendiri dan belum tentu merupakan pandangan Pemerintah Australia.

Kata Pengantar

Tahun 2020 menandai hari jadi lima tahun penandatanganan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan & Anak (Konvensi).

Program ASEAN-Australia Counter Trafficking (ASEAN-ACT) adalah kemitraan 10 tahun yang didanai oleh Pemerintah Australia yang bekerja bersama para Negara Anggota ASEAN untuk mendukung penerapan Konvensi, terutama kewajiban-kewajiban yang melindungi dan menegakkan hak-hak korban serta mengedepankan kesetaraan gender dan inklusi sosial.

Sebagai cara untuk menandai hari jadi lima tahun Konvensi, Laporan ini melihat Laporan Tahunan Perdagangan Orang yang diterbitkan oleh para Negara Anggota ASEAN pada tahun 2020.

Laporan tersebut mencatat bagaimana pendekatan yang diambil oleh para Negara Anggota ASEAN untuk pelaporan nasional kewajiban Konvensi mereka, dan menyajikan temuan-temuan pokok dan rekomendasi guna memandu pengembangan kebijakan dan kerja sama di masa depan demi mendukung tujuan Konvensi.

Penerbitan Laporan Dasar (*Baseline Report*) atas Laporan Tahunan Perdagangan Orang 2020 Negara Anggota ASEAN yang diterbitkan oleh ASEAN-ACT ini diharapkan akan menghasilkan transparansi lebih tinggi dari Laporan Tahunan nasional tersebut yang menampilkan pencapaian tahunan serta tantangan-tantangan yang terus dihadapi ketika berupaya menerapkan Konvensi secara penuh dan konsisten.

ASEAN-ACT akan memperbarui Laporan ini setiap tahun selama masa program (2018-2028) dan terus bekerja bersama ASEAN dan para negara anggotanya untuk menguatkan penerapan kewajiban Konvensi.



Dr Lucia Pietropaoli
ASEAN-ACT Team Leader

Daftar Isi

- 1 Ikhtisar: Temuan
- 2 Ikhtisar: Rekomendasi
- 3 Konvensi
- 4 Tahun 2020 – 5 tahun setelah penandatanganan
- 5 Mengapa data menjadi hal yang sangat penting untuk menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban dalam kasus TPPO?
- 6 Apa yang ingin diketahui korban perdagangan orang saat membuat keputusan yang tepat untuk menjadi saksi?
- 7 Negara-negara ASEAN menerbitkan data TPPO yang penting untuk
- 8 Pendekatan peka korban dalam kasus-kasus TPPO : 22 Indikator Kinerja Utama (KPI) Data
- 9 Potret 2020
 - (1) Transparansi (2) Data tren TPPO
 - (3) Data kunci manajemen kasus TPPO (4) Penyelesaian kasus TPPO di pengadilan
 - (5) Kompensasi untuk korban (6) Bantuan hukum bagi korban
 - (7) Kesaksian video lebih dahulu oleh korban (8) Data terpilah korban
 - (11) Transparansi pejabat yang terlibat (12) Transparansi putusan TPPO
- 15 Lampiran 1: 22 Indikator kunci data TPPO
 - Indikator 1-5
 - Indikator 6-9
 - Indikator 10-12
 - Indikator 13-16
 - Indikator 17-22
- 21 Ucapan Terima Kasih

Ikhtisar: temuan



3 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan Laporan Tahunan TPPO 2020 yang tersedia bagi umum pada tahun 2021.



2 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data tren 3-5 tahun tentang indikator kunci TPPO.



2 dari 10 Para Pihak ACTIP dapat melaporkan empat indikator manajemen kasus TPPO.



1 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data tentang hasil atas kasus pengadilan tingkat pertama yang diputus pada tahun 2020.



2 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data jumlah kasus Perdagangan Orang yang diputus di pengadilan tingkat pertama pada tahun 2020.



0 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data persentasi kasus-kasus TPPO yang diputus pada tahun 2020 dengan hasil korban menerima kompensasi.



2 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data tentang jumlah kasus TPPO yang diajukan dengan korban menerima bantuan hukum.



1 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data tentang jumlah korban yang bersedia memberikan kesaksian lewat video sebelum sidang pengadilan pada tahun 2020.



4 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data terpilah korban berdasarkan jenis kelamin.



4 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data terpilah korban berdasarkan usia.



0 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data terpilah korban berdasarkan disabilitas.



2 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan Laporan Tahunan TPPO 2020 yang menyajikan jumlah penyidikan, penuntutan, atau penghukuman pejabat yang terlibat dalam perdagangan orang.



1 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan secara daring (*online*) anonim putusan pengadilan TPPO yang dijatuhkan pada tahun 2020.

Ikhtisar: rekomendasi

- 1 ASEAN-ACT bekerjasama dengan ASEAN membantu Para Pihak ACTIP untuk menerbitkan Laporan Tahunan TPPO mereka.
- 2 ASEAN-ACT bekerjasama dengan Para Pihak ACTIP yang berminat untuk membantu memaparkan tren data yang menyajikan perkembangan data kunci Perdagangan Orang tahun demi tahun agar dapat lebih memahami pola dalam kasus-kasus TPPO.
- 3 ASEAN-ACT bekerja sama dengan Para Pihak ACTIP untuk meningkatkan pengumpulan dan analisis data Perdagangan Orang.
- 4 ASEAN-ACT bekerjasama dengan Para Pihak ACTIP untuk menerbitkan data dalam Laporan Tahunan TPPO mereka terkait kasus-kasus perdagangan orang yang dilaporkan dan diselesaikan pada tahun pelaporan dan hasil atas kasus-kasus tersebut.
- 5 ASEAN-ACT bekerjasama dengan Para Pihak ACTIP untuk menerbitkan data dalam Laporan Tahunan TPPO mereka tentang dukungan yang diberikan kepada korban perdagangan orang termasuk kompensasi, bantuan hukum dan kesaksian video yang direkam sebelum persidangan.
- 6 ASEAN-ACT bekerjasama dengan Para Pihak ACTIP untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menerbitkan data terkait korban perdagangan orang berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status disabilitas.
- 7 ASEAN ACT bekerjasama dengan Para Pihak ACTIP untuk menerbitkan jumlah penyidikan, penuntutan, atau penghukuman pejabat yang terlibat dalam perdagangan orang dalam Laporan Tahunan TPPO mereka semasa tahun pelaporan.
- 8 ASEAN-ACT bekerjasama dengan Para Pihak ACTIP untuk meningkatkan transparansi sehubungan dengan putusan perdagangan orang melalui penerbitan putusan yang telah melalui penyuntingan (*redacted*).



Konvensi

Pada November 2015, sepuluh negara ASEAN menandatangani Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak (Konvensi).

Bagian pembukaan dalam Konvensi menyatakan bahwa: para penandatangan mengakui bahwa perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap martabat manusia.

Mereka juga mengakui bahwa perdagangan orang disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor termasuk korupsi pemerintah, kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, sistem hukum yang tidak efisien, kejahatan terorganisir, dan tuntutan yang mendorong segala bentuk eksploitasi orang, terutama perempuan dan anak-anak, yang mengarah pada perdagangan orang, dan bahwa perdagangan orang harus ditangani secara efektif.

Para penandatangan menyadari kebutuhan untuk membentuk instrumen regional yang secara khusus menangani perdagangan orang sebagai kerangka hukum untuk tindakan regional di antara negara-negara Asia Tenggara dalam mencegah dan memerangi perdagangan orang, termasuk perlindungan, dan bantuan kepada, korban perdagangan orang.

Konvensi menetapkan kewajiban yang mengikat secara hukum [untuk...] membantu Negara-Negara Anggota ASEAN menghadapi tantangan, prioritas dan strategi nasional mereka yang beragam dalam memerangi perdagangan orang.



Tahun 2020 – 5 tahun setelah penandatanganan

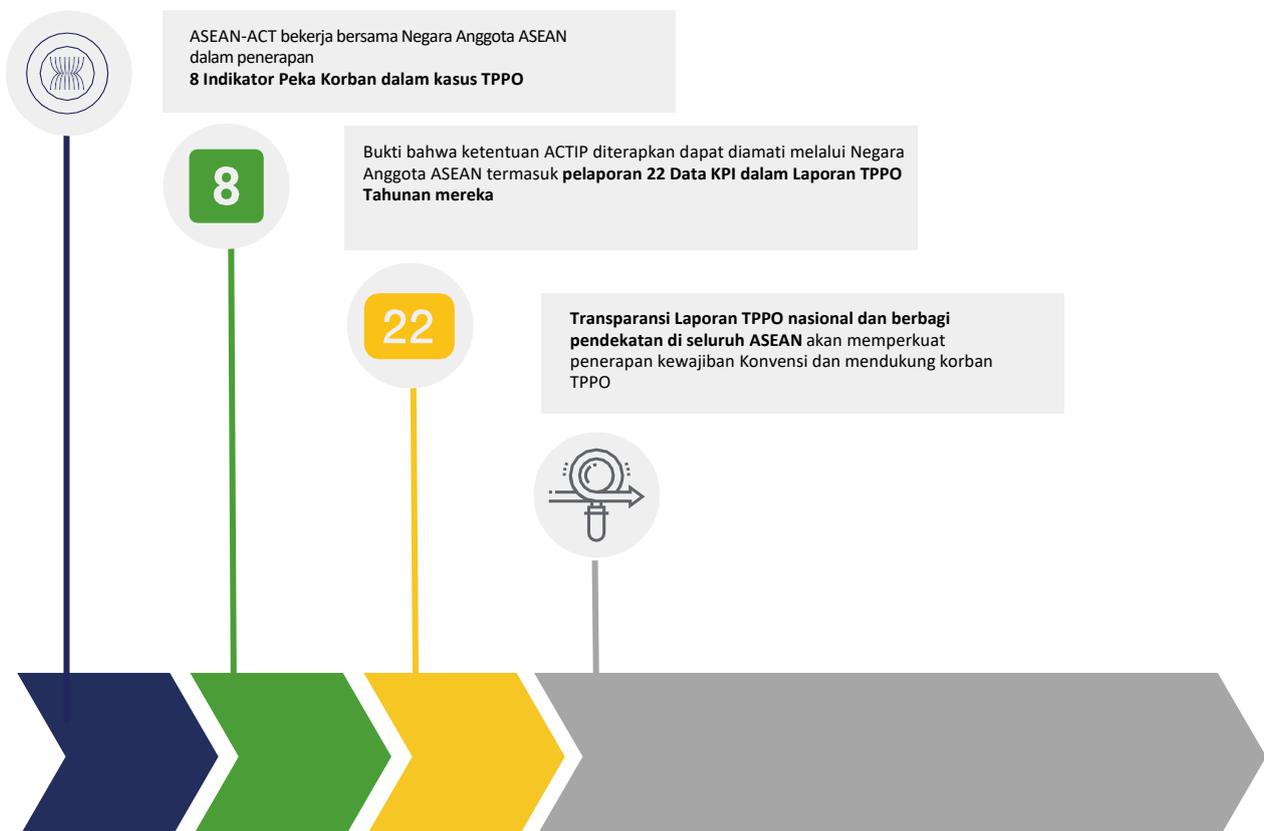
Konvensi menyatakan dengan jelas sebuah pendekatan yang kolaboratif untuk membentuk respon regional yang kokoh guna mencegah dan memerangi perdagangan orang serta menguatkan perlindungan atas, dan bantuan untuk, korban perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

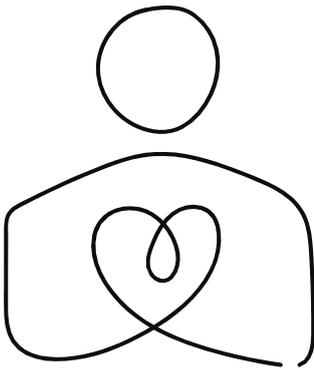
Penerapan Konvensi bertumpu pada pengumpulan, analisis, dan pembagian data nasional perdagangan orang guna menentukan apakah kewajiban perjanjian ditegakkan.

Penerbitan Laporan Tahunan Perdagangan Orang nasional yang transparan memastikan bahwa ratusan lembaga pemerintah dan non-pemerintah di seluruh Negara Anggota ASEAN yang bekerja untuk memajukan tujuan Konvensi dan mendukung para korban memiliki informasi yang sama guna menginformasikan dan meningkatkan penyampaian layanan mereka.

Tujuannya adalah menghindari pendekatan atas data milik lembaga yang terpecah-pecah yang tidak menyajikan gambaran yang lengkap dari tindakan nasional menerapkan Konvensi

**Konvensi ASEAN menentang Perdagangan Orang
Terutama Perempuan dan Anak /ASEAN Convention against Trafficking in
Persons Especially Women and Children (ACTIP)**
Memasukkan ketentuan kunci tentang dukungan bagi para korban





Mengapa data menjadi hal yang sangat penting untuk menerapkan pendekatan yang berpusat pada korban dalam kasus TPPO?

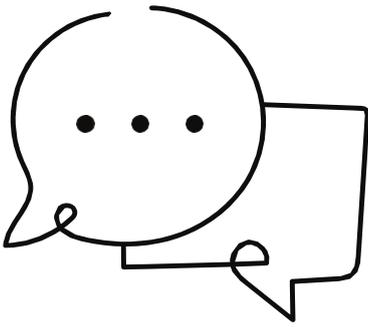
Negara Anggota ASEAN telah mengidentifikasi perlakuan peka terhadap korban pada setiap tahap kasus perdagangan orang sebagai suatu prioritas.

Penuntutan pelaku TPPO sangat bergantung pada korban yang disiapkan untuk menjadi saksi dalam proses hukum pidana dan menyajikan bukti dengan menceritakan hal yang terjadi pada mereka. Hal ini dapat menjadi pengalaman yang traumatis dan korban akan mau mengambil keputusan yang tepat ketika bertindak menjadi saksi.

Tanpa data nasional tentang kasus Perdagangan Orang yang menjelaskan hasil bagi si pelaku TPPO dan korban, mustahil bagi korban untuk mengambil keputusan yang tepat.

Transparansi Laporan Tahunan Perdagangan Orang nasional di seluruh wilayah ASEAN menunjukkan komitmen terhadap aspirasi regional dari Konvensi untuk melawan perdagangan orang, terutama perempuan dan anak.

Menerangkan bagaimana kasus TPPO ditangani di seluruh wilayah ASEAN dan perlakuan terhadap korban yang menjadi saksi dalam kasus tersebut juga diharapkan akan meningkatkan perlakuan terhadap korban dan hasil yang mereka terima. Hal ini akan dapat memacu lebih banyak korban untuk bersaksi dalam kasus TPPO di masa depan.



Apa yang ingin diketahui korban perdagangan orang untuk membuat keputusan yang tepat untuk menjadi saksi?





NEGARA-NEGARA ASEAN MENERBITKAN LAPORAN TAHUNAN PERDAGANGAN ORANG YANG PENTING UNTUK:



NEGARA ANGGOTA ASEAN

yang menandatangani
Konvensi ASEAN
Menentang Perdagangan
Orang, Terutama
Perempuan & Anak pada
tahun 2015

karena mereka
berkomitmen untuk
bekerjasama dalam upaya
melawan Tindak Pidana
Perdagangan Orang.
Penerbitan Laporan Tahunan
Perdagangan Orang
membangun dasar bukti
untuk mengevaluasi apakah
hasil pekerjaan mereka
membawa dampak



LEMBAGA PEMERINTAH & NON- PEMERINTAH

mendukung penampungan
(*shelter*), bantuan hukum,
layanan medis dan konseling bagi
korban

karena mereka
berkontribusi pada
pengumpulan dan analisis
data TPPO dalam rangka
memberikan berbagai
layanan dengan cara yang
efektif kepada korban
Perdagangan Orang.



KORBAN PERDAGANGAN ORANG

karena mereka
membutuhkan
informasi tertentu
untuk mengambil
keputusan yang tepat
tentang apakah
mereka ingin
memberi bukti dalam
kasus Perdagangan
Orang.



LEMBAGA PERADILAN NASIONAL

Seperti kepolisian,
kejaksaan, dan
pengadilan

karena mereka
bergantung pada
saksi dan korban
untuk memberi
bukti dalam kasus
Perdagangan
Orang.

Pendekatan Peka korban dalam kasus-kasus TPPO: 22 Indikator Kinerja Utama (KPI) Data

Negara anggota ASEAN mengidentifikasi perlakuan peka korban dalam kasus-kasus TPPO sebagai prioritas dalam Konvensi.

Sebagian besar Negara Anggota ASEAN telah mengumpulkan cukup banyak data tentang kasus perdagangan orang. Namun, Negara Anggota ASEAN dapat mempertimbangkan untuk menyajikan 22 indikator data berikut ini dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang nasional mereka. Sebagian besar Negara Anggota ASEAN telah mengumpulkan data ini dan pencantumannya dalam Laporan Tahunan Perdagangan Orang nasional akan memberikan gambaran sejauh mana Negara Anggota tersebut melaksanakan kewajiban Konvensi mereka dan pengalaman para korban perdagangan orang dalam proses ini jika mereka memilih untuk menjadi saksi dalam proses pidana atau mengajukan kasus perdata untuk mendapatkan kompensasi.

Data KPI di bawah ini mendukung Prinsip dan Pedoman yang Direkomendasikan tentang Hak Asasi Manusia dan Perdagangan Orang yang disusun oleh Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta 8 Indikator Peka Korban dan Pedoman pelaksanaannya yang disusun oleh ASEAN-ACT.

Pembahasan lebih rinci mengenai 22 Indikator Kinerja Utama Data dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Toolkit ASEAN-ACT tentang Indikator Kinerja Utama Data TPPO: Menyusun Dasar Bukti untuk Pendekatan Peka Korban terhadap Perdagangan Orang di Seluruh Kawasan ASEAN.



Potret 2020

Temuan berikut ini berdasarkan pada ulasan dari Laporan Tahunan TPPO yang diterbitkan secara daring oleh empat dari 10 Negara Anggota ASEAN yang menjadi pihak dalam Konvensi

Laporan Tahunan TPPO ini tersedia di [ASEAN-ACT Partnership Hub: aseanactpartnershiphub.com](http://aseanactpartnershiphub.com)



Kamboja



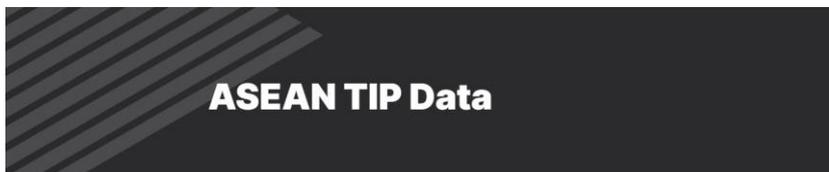
Indonesia



Filipina



Thailand



ASEAN-ACT supports ASEAN Member States to implement their obligations under the [ASEAN Convention on Trafficking in Persons, especially Women and Children \(ACTIP\)](#).

Implementation relies on the collection, analysis and sharing of national trafficking in persons data. Publishing this data is even more valuable as it allows government and non-government to consider how their efforts may be contributing to outcomes.

To download annual trafficking in persons reports published by our program partners, click on the links below. Permission has been sought to publish any TIP report that does not appear on national websites.

Filters Hide cover images

Year	Countries	Agencies
2021	<input type="checkbox"/> Cambodia	<input type="checkbox"/> Government Ministries
2020	<input type="checkbox"/> Indonesia	<input type="checkbox"/>
2019	<input type="checkbox"/> Philippines	<input type="checkbox"/>
2018	<input type="checkbox"/> Thailand	<input type="checkbox"/>
2017		
2016		
2015		
2014		

Search...

Search





Transparansi

3 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan Laporan Tahunan TPPO 2020 yang tersedia untuk umum pada tahun 2021: Kamboja, Filipina, Thailand.



Rekomendasi:

ASEAN-ACT bekerjasama dengan ASEAN membantu Para Pihak ACTIP menerbitkan Laporan Tahunan TPPO mereka.



Data Tren TPPO

2 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data tren 3-5 tahun tentang indikator utama TPPO guna memberikan dasar bukti kepada pemerintah dan masyarakat untuk menginformasikan kebijakan dan program mereka untuk melawan TPPO: Thailand dan Indonesia.



Rekomendasi:

ASEAN-ACT bekerjasama dengan Para Pihak ACTIP yang berminat untuk membantu memaparkan data tren yang menyajikan perkembangan data utama Perdagangan Orang tahun demi tahun agar dapat lebih memahami pola dalam kasus-kasus TPPO.





Data Kunci Manajemen Kasus TPPO

2 dari 10 Para Pihak ACTIP dapat melaporkan empat indikator manajemen kasus TPPO berikut ini yang berkaitan dengan penyidikan, penuntutan, kasus di tingkat pertama dan banding, dan lama rata-rata kasus TPPO: Thailand dan Indonesia.



Rekomendasi:

ASEAN-ACT bekerja bersama Para Pihak ACTIP untuk meningkatkan pengumpulan, analisis, dan penerbitan data TPPO.



Penyelesaian Kasus TPPO di Pengadilan

1 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data tentang hasil atas kasus pengadilan tingkat pertama yang diputus pada tahun 2020: Thailand.



Sementara 2 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data tentang jumlah kasus Perdagangan Orang yang diputus di pengadilan tingkat pertama pada tahun 2020: Indonesia dengan 200 kasus selesai dan Thailand dengan 199 kasus.



Rekomendasi:

ASEAN-ACT bekerja bersama Para Pihak ACTIP untuk menerbitkan data dalam Laporan Tahunan TPPO mereka tentang kasus TPPO yang dilaporkan dan diselesaikan pada tahun pelaporan dan hasil atas kasus-kasus tersebut.

5

Kompensasi untuk Korban

0 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data persentase kasus TPPO yang diputus pada tahun 2020 yang korbannya menerima kompensasi baik dari dana kompensasi nasional atau restitusi/ganti rugi dari pelaku TPPO.



6

Bantuan Hukum bagi Korban

2 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data tentang jumlah kasus TPPO yang diajukan dengan korban memperoleh bantuan hukum: Kamboja dan Indonesia.





Kesaksian Video Lebih Dulu oleh Korban

1 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data tentang jumlah korban yang bersedia memberikan kesaksian lewat video sebelum sidang pengadilan pada tahun 2020: Thailand.



Rekomendasi:
ASEAN-ACT bekerja bersama Para Pihak ACTIP untuk menerbitkan data dalam Laporan Tahunan TPPO mereka tentang dukungan yang disediakan untuk korban TPPO termasuk kompensasi, bantuan hukum, dan kesaksian video yang direkam sebelum persidangan .



Data Terpilah Korban



4 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data terpilah korban berdasarkan jenis kelamin: Kamboja, Indonesia, Filipina, Thailand.



4 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data terpilah korban berdasarkan usia: Kamboja, Indonesia, Filipina, Thailand.



0 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan data terpilah korban berdasarkan disabilitas.



Rekomendasi:
ASEAN-ACT bekerja bersama Para Pihak ACTIP untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menerbitkan data yang berkaitan dengan korban Perdagangan Orang berdasarkan jenis kelamin, usia, dan status disabilitas..

14 DATA TERPILAH ATAS JENIS KELAMIN

15 DATA TERPILAH ATAS USIA

16 DATA TERPILAH ATAS DISABILITAS



Transparansi Pejabat yang Terlibat

2 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan Laporan Tahunan TPPO 2020 yang menyajikan jumlah penyelidikan, penuntutan, atau penghukuman pejabat yang terlibat dalam perdagangan orang: Thailand dan Filipina.



Rekomendasi:

ASEAN-ACT bekerja bersama Para Pihak ACTIP untuk menerbitkan jumlah penyelidikan, penuntutan, atau penghukuman pejabat yang terlibat dalam perdagangan orang dalam Laporan Tahunan TPPO mereka semasa tahun pelaporan.



Transparansi Putusan TPPO

1 dari 10 Para Pihak ACTIP menerbitkan secara daring putusan pengadilan TPPO yang dianonimkan yang dijatuhkan pada tahun 2020: Basis Data Putusan Mahkamah Agung Indonesia.



Rekomendasi:

ASEAN-ACT bekerja bersama Para Pihak ACTIP untuk meningkatkan transparansi sehubungan dengan putusan perdagangan orang melalui penerbitan putusan yang telah melalui penyuntingan (*redacted*).

The screenshot shows the 'Direktori Putusan' (Case Registry) website. On the left, there are filters for 'Perdagangan Orang' (Human Trafficking) and 'Putusan' (Judgments). The main area shows search results for 'Ditemukan 130 data'. The first result is 'Putusan PN RUTENG Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Rtg' dated 16 June 2020. The text of the judgment is partially redacted with grey boxes, obscuring some details.

Lampiran 1

22 Indikator Utama Data TPPO

ASEAN-ACT telah mengembangkan Toolkit tentang cara melaporkan 22 Indikator data TPPO ini yang juga menyajikan contoh bagaimana negara-negara ASEAN telah menangani kewajiban pelaporan ini.

Lampiran Toolkit membantu penyajian data tren pada indikator utama data TPPO.

On the Frontlines: Operationalizing Good Practice in TIP Data Collection adalah pedoman terperinci tentang semua aspek pengumpulan Data TPPO yang diterbitkan oleh Nexus Institute pada tahun 2019 dan merupakan panduan yang sangat berharga bagi negara-negara yang mencari panduan langkah demi langkah.

Program ASEAN-ACT akan terus memberikan bantuan kepada Negara-negara Anggota ASEAN untuk memperkuat pelaporan mereka tentang pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak.





Indikator 1-5



Area Tematik: Data Manajemen Kasus dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan

Mengapa ini penting untuk pendekatan peka korban?

Data Penuntutan TPPO, khususnya apabila disajikan sebagai tren 3-5 tahun menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kasus TPPO, mulai dari laporan polisi hingga putusan kasus di pengadilan, apakah ada hal yang menghambat berjalannya proses peradilan kasus TPPO, dan apakah ada kasus TPPO dengan jumlah signifikan yang melalui proses banding ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi.

Panjangnya waktu suatu kasus diselesaikan dan kemungkinan keputusan diajukan untuk banding ke pengadilan lebih tinggi adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh korban ketika membuat keputusan berdasarkan informasi untuk menjadi saksi dalam suatu kasus TPPO.

KPI Data ini menunjukkan penerapan kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 12 & 16 dari Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang



Indikator 6-9



Area Tematik: Hasil untuk Korban

Mengapa ini penting bagi pendekatan peka korban?

Indikator data hasil TPPO menunjukkan jumlah kasus di mana hukuman atau pembebasan dicatat dan jumlah kasus di mana perintah kompensasi / restitusi / ganti rugi dibuat dan kasus-kasus di mana korban benar-benar menerima kompensasi baik dari dana kompensasi nasional atau restitusi/kerugian dari pelaku perdagangan orang.

Kemungkinan keberhasilan penuntutan dalam kasus perdagangan orang dan apakah pengadilan secara rutin memberikan perintah untuk kompensasi, restitusi, atau ganti rugi merupakan faktor penting yang akan dipertimbangkan oleh seorang korban ketika membuat keputusan berdasarkan informasi tentang apakah akan menjadi saksi dalam kasus TPPO.

KPI Data ini menunjukkan penerapan kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 14 & 16 Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang



Indikator 10-12



Area Tematik: Dukungan untuk Korban

Mengapa ini penting bagi pendekatan peka korban?

Indikator data TPPO ini menunjukkan berapa banyak kasus TPPO yang korbannya mendapatkan bantuan hukum atas hak-haknya (hal ini dapat terjadi pada tahapan yang berbeda dalam proses peradilan pidana), apakah seorang korban dapat merekam keterangan saksi menjelang persidangan dan apakah ada proses yang jelas untuk mengajukan pengaduan tentang cara korban diperlakukan pada setiap tahap dalam proses penanganan kasus TPPO.

Masing-masing set data ini penting untuk memungkinkan korban membuat keputusan berdasarkan informasi apakah akan menjadi saksi dalam kasus TPPO. Bantuan hukum dan kemampuan memberikan keterangan saksi yang telah direkam sebelumnya merupakan cara untuk mengurangi trauma yang sering dialami oleh korban TPPO. Saran yang diberikan kepada korban tentang mekanisme penanganan pengaduan masyarakat menunjukkan bahwa ada standar perlakuan yang harus dipertahankan jika mereka memutuskan untuk menjadi saksi dalam kasus perdagangan orang.

Informasi lebih lanjut tentang bagaimana menerapkan indikator-indikator ini yang berfokus pada dukungan bagi korban dapat ditemukan di [Panduan untuk Pengadilan Peka Korban](#).

KPI Data ini menunjukkan pelaksanaan kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 11 & 14 dalam Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang



Indikator 13-16



Area Tematik: Bentuk Data Terpilah tentang Perdagangan Orang dan Korban

Mengapa ini penting bagi pendekatan peka korban?

Mengumpulkan data tentang jenis kelamin, usia, dan disabilitas sangat penting untuk memahami siapa korban dan jenis dukungan yang dibutuhkan.

Menggunakan [*Washington Group Short Set of questions on functioning*](#) akan memberikan pesan kewaspadaan kepada pengadilan, lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil terhadap bantuan khusus yang akan diperlukan oleh orang dengan disabilitas.

Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan Orang menyampaikan pentingnya mengumpulkan data status disabilitas dalam [*comments made to the 24th Session UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities*](#):

Titik temu antara disabilitas dan perdagangan orang merupakan ranah yang telah diabaikan dalam hukum, kebijakan, dan praktik internasional tentang perdagangan orang. Kesenjangan ini harus segera diatasi karena merupakan hal mendesak. Data terpilah yang terbatas tersedia tentang pengalaman para penyandang disabilitas dalam perdagangan orang, atau prevalensi bentuk-bentuk eksploitasi. Hal ini berkontribusi pada kurangnya visibilitas, serta kurangnya pengetahuan dan praktik yang baik.

Set data dari *Washington Group Short Set* yang harus dipertimbangkan pada tahap identifikasi korban dan yang digunakan di seluruh dunia dalam sensus dan aktivitas pengumpulan data Biro Statistik:

- Apakah anda memiliki kesulitan penglihatan?
- Apakah anda memiliki kesulitan pendengaran?
- Apakah anda memiliki kesulitan berjalan atau bergerak dari satu tempat ke lainnya?
- Apakah anda memiliki kesulitan memahami atau berkonsentrasi?
- Apakah anda memiliki kesulitan untuk dipahami oleh orang lain?

Informasi selengkapnya tentang cara menerapkan Indikator yang berfokus pada dukungan bagi korban dapat ditemukan di [Pedoman untuk Pengadilan Peka Korban](#).

KPI Data ini menunjukkan pelaksanaan kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 5, 12, 14 & 16 dalam Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang



Indikator 17-22



Area Tematik: Transparansi data TPPO untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah, dan mitra di luar pemerintah yang bekerja memerangi perdagangan orang

Mengapa ini penting bagi pendekatan peka korban?

Indikator data TPPO penting karena ACTIP merupakan konvensi regional yang memerlukan adanya pembagian data kunci tentang TPPO guna memastikan tujuan Konvensi dapat tercapai. Diharapkan publikasi data tentang tren 3-5 tahun yang dilakukan tepat waktu setiap akhir tahun akan menghasilkan informasi yang lebih baik bagi ratusan mitra pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan pengadilan yang terlibat dalam penerapan ACTIP.

Informasi selengkapnya tentang cara menerapkan Indikator yang berfokus pada dukungan bagi korban dapat ditemukan di [Pedoman untuk Pengadilan Peka Korban](#).

KPI Data ini menunjukkan penerapan kewajiban yang dijelaskan dalam Pasal 8 dan 11-16 dalam Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Orang

Ucapan Terima Kasih

Laporan ini merupakan hasil dari sejumlah diskusi dan komunikasi email dengan Komite Koordinasi Nasional di Kamboja, Laos, Filipina, Thailand dan Vietnam. Negara Anggota ASEAN lainnya diinformasikan melalui perwakilan mereka yaitu melalui Pertemuan Pejabat Senior tentang Kejahatan Transnasional/ *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC).

ASEAN-ACT akan terus bekerja dengan ASEAN dan negara anggotanya untuk memperkuat penerapan kewajiban ACTIP dan meningkatkan kualitas dan transparansi Data Perdagangan Orang.



Kamboja



Indonesia



Lao PDR



Filipina



Thailand



Vietnam

